

SKRIPSI

PENGARUH PEMBANGUNAN GENDER, PEMBERDAYAAN GENDER DAN BONUS DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

FITRIA AMIN

A011191053



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PEMBANGUNAN GENDER, PEMBERDAYAAN GENDER DAN BONUS DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi

Disusun dan dan diajukan oleh

FITRIA AMIN

A011191053



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PEMBANGUNAN GENDER, PEMBERDAYAAN GENDER DAN BONUS DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan dan diajukan oleh

FITRIA AMIN

A011191053

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 13 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Fatmawati, SE., M.Si, CMW®
NIP. 19640106 198803 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF
NIP. 19660811 199103 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE, M.Si, CWM®
NIP 1974071520002121003

SKRIPSI

PENGARUH PEMBANGUNAN GENDER, PEMBERDAYAAN GENDER DAN BONUS DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan dan diajukan oleh

FITRIA AMIN

A011191053

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 13 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, SE., M.Si, CMW@.	Ketua	1. 
2.	Dr. Sri Undal Nurbayani, SE., M.Si., CPF.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Madris, SE., M.Si., CMW@.	Anggota	3. 
4.	Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin


Dr. Saib, SE, M.Si, CWM@
NIP. 1974071520002121003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fitria Amin
NIM : A011191053
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
"Pengaruh Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Bonus Demografi
terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan"

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Fitria Amin

PRAKATA

Assalamualaikum Waromatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Bonus Demografi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, serta saran dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pelajaran bagi penulis pribadi maupun para pembaca.

Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu Bapak Ahmad, Ibu Masita Hamdjah, Ibu Ariyanti dan Ibu Marwah Hamdjah tercinta yang telah memberikan banyak doa dan didikan serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemuliaan atas semua hal berarti yang telah mereka lakukan. Kepada Adikku Mira Aisyah Rahmi, Faaidah dan Faaizah yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati, SE., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Drs. Baso Siswadarma, M.Si. selaku penasihat akademik yang selalu memberi nasehat dan arahan kepada penulis saat berproses di bangku perkuliahan.
5. Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si, CMW®. selaku pembimbing I beserta Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF. selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Madris, SE., DPS., M.Si. CWM®. dan Bapak Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si. selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan Ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasehat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada trio dingdong yaitu rosa dan fatma, serta Kopiten yaitu Adiva, Asridha, Putri, Naya, Shefia, Ina, Rahmasari dan Ardi. Tak lupa juga teman seperjuangan bimbingan yaitu ratna sari, dita, dan nurul. Terima kasih hingga saat ini telah memberikan dukungan dan motivasi yang sangat membantu penulis. Semoga seterusnya kita terus menjalin pertemanan hingga tua nanti. Aamiin.

9. Teman-teman Griffins dan keluarga besar Himajie, terima kasih telah menemani saat suka maupun duka dalam berproses sebagai mahasiswa. Semoga cita-cita dan impian kita tercapai. Aamiin.
10. Teman-teman KKN Gel. 107 Ujung Pandang dan Posko 4 terkeren, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam menjalankan KKN dan menjadi penyemangat dalam menyusun skripsi ini. Semoga seterusnya kita menjalin pertemanan hingga tua nanti. Aamiin.
11. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekuranganyang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 13 Juni 2023

Fitria Amin

ABSTRAK

PENGARUH PEMBANGUNAN GENDER, PEMBERDAYAAN GENDER DAN BONUS DEMOGRAFI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fitria Amin

Fatmawati

Sri Undai Nurbayani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan gender, pemberdayaan gender dan bonus demografi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang digunakan adalah data persentase penduduk miskin, IPG, IDG, dan Rasio Ketergantungan. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model terpilih *Random Effect Model*. Penelitian ini menemukan bahwa variabel pembangunan gender dan pemberdayaan gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, variabel bonus demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian.

Kata Kunci:

Kemiskinan, Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender, Bonus Demografi.

ABSTRACT

THE EFFECT OF GENDER DEVELOPMENT, GENDER EMPOWERMENT AND DEMOGRAPHIC BONUS ON POVERTY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Fitria Amin

Fatmawati

Sri Undai Nurbayani

This study aims to analyze the effect of gender development, gender empowerment and demographic bonus on poverty in South Sulawesi Province during the period 2017-2021. This research is a quantitative type of research using secondary data obtained from the Indonesian Central Statistics Agency (BPS). The data used are poverty, GDI, GEI, and Dependency ratio. These data are tabulated into a panel data structure. This research uses panel data analysis with the selected Random Effect Model. This research found that the variables of gender development and gender empowerment have a negative and significant effect on poverty in South Sulawesi Province. Meanwhile, the demographic bonus variable has a positive and significant effect on poverty in South Sulawesi Province during the research period.

Keywords: *Poverty, Gender Development, Gender Empowerment, Demographic Bonus.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERTANYAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teoritis	7
2.1.1 Kemiskinan.....	7
2.1.2 Gender	12
2.1.3 Bonus Demografi	23
2.2 Hubungan Antar Variabel	25
2.2.1 Hubungan antara Gender dan Kemiskinan	25
2.2.2 Hubungan antara Bonus Demografi dan Kemiskinan	27
2.3 Tinjauan Empiris.....	29
2.4 Kerangka Konsep Penelitian.....	31
2.5 Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	34
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3 Metode Analisis Data	34
3.3.1 Model Estimasi Regresi Data Panel	37

3.3.2	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	38
3.3.3	Uji Statistik.....	39
3.4	Definisi Operasional	41
BAB IV	PEMBAHASAN.....	43
4.1	Gambaran Umum	43
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian.....	44
4.3	Hasil Analisis	47
4.3.1	Pemilihan Model	47
4.2.2	Uji Statistik.....	49
4.4	Pembahasan	52
4.4.1	Pengaruh Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan	52
4.4.2	Pengaruh Pemberdayaan Gender terhadap Kemiskinan	54
4.4.3	Pengaruh Bonus Demografi terhadap Kemiskinan	55
BAB V	PENUTUP	57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....		60
LAMPIRAN		64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 di Sulawesi Selatan	1
Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik	49
Tabel 4. 2 Individual Effect.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Variabel.....	64
Lampiran 2 Hasil Uji Chow.....	67
Lampiran 3 Hasil Uji Hausman	67
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik	68
Lampiran 5 Biodata Peneliti.....	69

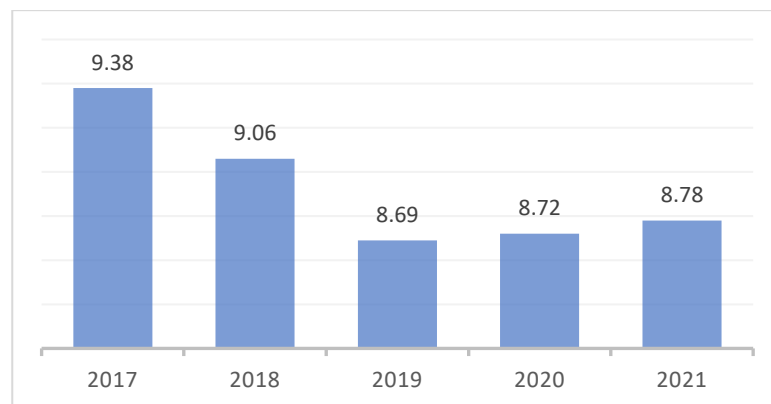
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan masih menjadi masalah klasik bagi banyak negara. Implikasi masalah kemiskinan menyertakan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan kultural yang multidimensi yang dimana mencakup di dalamnya politik, sosial, ekonomi, aset, sumberdaya alam, psikologi, dan lain-lain. Secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi rentan, tak berdaya, terisolasi dan tidak mampu untuk menyampaikan aspirasinya (Sukesi, 2015).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, persentase penduduk kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami naik turun. Hal itu ditandai dari grafik dibawah ini:



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2021

Gambar 1. 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2021 di Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan keadaan Maret 2021 berjumlah 784,98 ribu jiwa atau 8,78 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada **Gambar 1.1** menunjukkan bahwa penduduk miskin mengalami peningkatan secara persentase yaitu sebesar

0,06 persen atau mengalami peningkatan secara absolut sebesar 8,15 ribu jiwa di tahun 2021 jika dibandingkan kondisi Maret 2020 yang besarnya 8,72 persen atau 776,83 ribu jiwa.

Gender diartikan sebagai bentuk sosial yang membedakan peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Peran perempuan seringkali dikaitkan hanya dengan mengurus rumah tangga dan mendidik anak di rumah, sedangkan laki-laki yang bertugas mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Realitanya perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan terutama dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi. Fakta mengenai standar hidup penduduk termiskin memperlihatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban utama dan subjek yang paling menderita dari adanya kemiskinan (Todaro, 2012). Berdasarkan tujuan SDG's kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka (Kemenpppa, 2020).

Kapasitas perempuan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan derajat kesehatan mereka. Bagi kelompok miskin, pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Namun bagi perempuan miskin, pendidikan menjadi lebih tidak diprioritaskan. Jika dalam sebuah keluarga miskin tersisa sejumlah dana pendidikan, besar kemungkinan dana yang terbatas tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak laki-laki. Selain itu,

tenaga anak perempuan sering kali dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama ibu mereka. Demikian pula dalam hal kemiskinan, masih ada ketimpangan akses perempuan terhadap sarana kesehatan yang memadai. Ketimpangan tersebut tercermin pada tingginya angka kematian ibu melahirkan (AKI). Semakin miskin seorang perempuan maka semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan terlatih pada saat melahirkan (Indraswari, 2009).

Dalam partisipasi ekonomi dan politik, perempuan lebih tertinggal daripada laki-laki. Pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan minim/lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal. Minimnya akses tersebut terkait kesulitan yang dihadapi kesulitan yang dihadapi kelompok miskin dalam penyediaan jaminan sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman perbankan. Dalam perbandingan relatif dengan laki-laki, perempuan miskin menghadapi kendala lebih besar dalam akses terhadap kredit perbankan karena kepemilikan aset yang dapat dijadikan jaminan lebih sering di atasnamakan laki-laki (Indraswari, 2009). Pemberdayaan terkait minim/lemahnya suara perempuan melalui partisipasinya dalam bidang politik. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik dapat disebabkan oleh adanya komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memadai bagi kepentingan perempuan dan juga kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki (Talaohu, 2021).

Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya informasi, stigma bahwa perempuan bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga, adanya diskriminasi gender, dan juga biaya yang tinggi untuk pekerjaan

yang ditargetkan (Kemenpppa, 2019). Di samping itu, pekerja perempuan mengalami diskriminasi dalam hal pengupahan. Rata-rata pekerja perempuan hanya mendapat upah 70% dari upah pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Adanya diskriminasi upah terselubung melalui perbedaan pembayaran komponen tunjangan keluarga dan tunjangan Kesehatan. Pekerja laki-laki yang berstatus menikah mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan Kesehatan untuk keluarga dan dirinya. Sedangkan pekerja perempuan yang berstatus menikah tetap dianggap lajang dan tidak mendapat tunjangan keluarga serta mendapat tunjangan kesehatan hanya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, total penghasilan perempuan lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama (Indraswari, 2009).

Perubahan struktur demografi melalui peningkatan penduduk usia produktif atau bonus demografi dapat menurunkan angka ketergantungan yang berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan. Bonus demografi dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang disebut dengan window of opportunity yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan bonus demografi yang tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan yang serius seperti meningkatnya tingkat pengangguran, tingginya angka kriminalitas, pertumbuhan ekonomi yang menurun dan juga kemiskinan yang semakin tinggi. Dalam mengoptimalkan window of opportunity melalui bonus demografi dan menghindari dampak negative bonus demografi, kuantitas sumberdaya manusia baik laki-laki maupun perempuan perlu diimbangi dengan kualitas yang memadai (Setiawan, 2018).

Persoalan gender dan rasio ketergantungan menjadi perhatian penting agar dapat memberikan kontribusi yang berpengaruh langsung pengentasan kemiskinan. Keselarasan sisi kesehatan, pendidikan, standar hidup layak, partisipasi dalam lembaga antara laki-laki dan perempuan dan jumlah tanggungan mampu menjadi penyokong berkurangnya kemiskinan, terutama kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengusung topik mengenai kemiskinan, dengan judul “Pengaruh Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Bonus Demografi terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan?
2. Apakah terdapat pengaruh Pemberdayaan Gender terhadap Kemiskinan?
3. Apakah terdapat pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap Kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembangunan Gender terhadap Kemiskinan

2. Untuk mengetahui pengaruh Pemberdayaan Gender terhadap Kemiskinan
3. Untuk mengetahui pengaruh Bonus Demografi terhadap Kemiskinan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademi
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan terutama untuk pengembangan dan pemanfaatan kajian mengenai gender dan kemiskinan.
 - b. Sebagai referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa mendatang.
2. Manfaat Teorema
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian lebih lanjut.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Kemiskinan hadir karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, sanitasi air, tingkat kesehatan dan pendidikan memadai. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan mereka yang dikategorikan miskin biasanya tidak memiliki pekerjaan, serta mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai (Ferezagia, 2018).

Menurut Todaro (2012) kemiskinan adalah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka dikategorikan sebagai penduduk yang hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau yang biasa disebut garis kemiskinan. Disisi lain, teori *endogenous growth* muncul memberikan solusi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi faktor produksi yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Agussalim (2009) dalam bukunya “Mereduksi Kemiskinan” menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi yaitu : pertama, kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan, dan konsumsi serta

keterbatasan akses terhadap faktor produksi dan tingkat pengembalian terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Kedua, kemiskinan juga merupakan akibat dari proses marginalisasi dan proses sosial, politik dan ekonomi. Bentuk marginalisasi ini tercerminkan pada sisi etnik, kelas masyarakat, bahkan gender.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia seringkali didasarkan pada pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik BPS, dimana pendekatan ini menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin dikategorikan berdasarkan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah suatu standar tertentu, salah satunya yang disebut garis kemiskinan.

Ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya karena tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif diartikan sebagai perbandingan antara kelompok pendapatan masyarakat. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, dapat terlihat ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat. Disisi lain, dengan menggunakan koefisien Gini, maka kelompok penduduk dengan pendapatan terendah atau 20% penduduk kelas terendah dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan juga dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya yang dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan karena kegagalan individu dan atau lingkungan

fisik sebagai objeknya sehingga seseorang menjadi sulit untuk melakukan usaha atau mendapatkan pekerjaan, baik karena faktor kemalasan, kurang keterampilan, kelemahan fisik, maupun faktor lingkungan yang tidak mendukung seperti perkembangan teknologi yang rendah dan lingkungan alam yang tidak mendukung. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem social ekonomi yang berlaku yang membuat kekuasaan dan sumberdaya terkonsentrasi pada pihak tertentu sehingga menghambat peluang pihak lain untuk mengakses dan menggunakan sarana ekonomi dan fasilitas yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Indraswari (2009) menjabarkan diagnosa umum penyebab kemiskinan merupakan kegagalan pemenuhan hak-hak dasar diantaranya: (i) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, (ii) terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan, (iii) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, (iv) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, (v) terbatasnya akses layanan perumahan, (vi) terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, (vii) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (viii) memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, (ix) lemahnya jaminan hak atas rasa aman, dan (x) lemahnya akses partisipasi masyarakat miskin.

Menurut Todaro (2012) penyebab kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan oleh interaksi 6 karakteristik diantaranya; (a) Tingkat pendapatan nasional negara berkembang yang rendah dan laju pertumbuhan ekonomi yang terbilang lambat, (b) Pendapatan per kapita dinegara berkembang masih rendah begitupun dengan pertumbuhannya, bahkan beberapa mengalami stagnasi, (c) Tingginya

ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat, (d) Mayoritas penduduk di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan absolut, (e) Fasilitas dan pelayanan kesehatan di negara berkembang sangat buruk dan terbatas sehingga tak jarang terdapat kekurangan gizi dan wabah penyakit yang selanjutnya menambah tingkat kematian bayi hingga sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan di negara maju, dan (f) Fasilitas pendidikan di negara berkembang masih kurang memadai, hal itu dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan masih kurang relevan.

Teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Dua paradigma tersebut adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial. Syahyuti (2006) menjelaskan paradigma tersebut, diantaranya:

1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini, fokus utama dalam melihat kemiskinan adalah individu dan mekanisme pasar bebas. Dalam pendekatan ini, kebebasan individu menjadi komponen penting masyarakat. Dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang bergantung pada pilihan-pilihan individu. Solusi dari persoalan kemiskinan yang dijelaskan dalam paradigma ini adalah melalui mekanisme pasar. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menghapuskan kemiskinan. Paradigma ini beranggapan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat

minimum. Peran negara baru dilakukan bila insitusi dimasyarakat, seperti keluarga, kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu menangani kemiskinan.

2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Berbeda dengan paradigma sebelumnya, paradigma demokrasi-sosial melihat kemiskinan sebagai persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan menjadi penyebab adanya kemiskinan di dalam masyarakat. Selain itu, tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu mengakibatkan kemiskinan ada di dalam masyarakat. Paradigma ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang dihapuskan karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif.

Pendekatan ini menekankan pada kesetaraan sebagai kunci penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi diri, seperti pendidikan, kesehatan yang baik, dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini dimaksudkan kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan. Negara menjadi peranan terpenting dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan harus ditangani secara institusional misalnya melalui program jaminan sosial dengan pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun yang dapat meningkatkan kebebasan seseorang. Hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihannya.

Selain teori kemiskinan dari dua paradigma diatas, Ragna Nurkse (1953) juga mengemukakan teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Teori ini beranggapan bahwa suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. Dalam teori ini kemiskinan dikonsepsikan sebagai suatu hubungan melingkar dari sumber - sumber daya yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara terus menerus dalam kemiskinan. Dengan kata lain, lingkaran setan digunakan sebagai perumpamaan bahwa kemiskinan diibaratkan sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang sama. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan produktivitas rendah sehingga berdampak pada pendapatan yang rendah pula. Pendapatan yang rendah ini berimplikasi pada tabungan dan investasi yang rendah dan kembali lagi berakibat pada keterbelakangan (Kuncoro, 2003).

Oscar Lewis mengembangkan teori lingkaran kemiskinan melalui teorinya yang berjudul "*The Culture of Poverty*". Teori ini menjelaskan bahwa orang yang berada dalam budaya kemiskinan memiliki perasaan yang kuat dari keterpinggiran, ketidakberdayaan, ketergantungan, atau merasa tidak memiliki. Mereka seperti orang asing di negara mereka sendiri, disisi lain lembaga yang ada tidak melayani kepentingan dan kebutuhan mereka (Auerbach, 2011).

2.1.2 Gender

Dalam mengkaji isu gender, seringkali definisi gender dan jenis kelamin disamakan. Menurut *World Health Organization* (2012), gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan

perempuan. Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan pada perempuan dan pada laki-laki. Seperti juga ras, suku, maupun kelas, gender merupakan kategori sosial yang paling menentukan kesempatan hidup dan peran serta seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Peran dan hubungan gender dapat sangat beragam antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Peran dan hubungan gender berkembang dari interaksi yang terjadi anatara berbagai kendala biologis, teknologi, ekonomis dan kendala-kendala sosial lainnya.

Cukup banyak teori-teori mengenai gender yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminisme. Kajian mengenai gender ini banyak mengadopsi teori-teori sosiologi dan psikologi karena banyak mempermasalahkan mengenai bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Menurut Marzuki (2007) terdapat beberapa teori gender yang cukup populer dan dianggap penting.

1. Teori Struktural-Fungsional

Teori struktural-fungsional ini merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berasumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini berusaha mencari, mengidentifikasi dan mencoba menjelaskan unsur-unsur yang berpengaruh didalam masyarakat. Terkait peran gender, teori ini melihat masyarakat pra industri yang terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Dengan kata lain, laki-laki lebih banyak diluar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan, sedangkan perempuan terbatas disekitar rumah untuk

mengurus rumah tangga. Pembagian kerja ini berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang stabil.

2. Teori Sosial-Konflik

Teori sosial-konflik ini diidentikkan dengan teori Marx yang dimana mencoba mengemukakan gagasan perbedaan dan ketimpangan gender yang tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi bagian dari penindasan kelas yang berkuasa yang diterapkan dalam konsep keluarga. Teori sosial-konflik ini mempunyai asumsi yang bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu: 1) pola relasi

sosial yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang, walaupun mempunyai karakteristik yang sistemik; 2) maka konflik adalah suatu hal yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas terutama kekuasaan; dan 4) konflik merupakan sumber utama terjadinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

3. Teori Feminisme Liberal

Teori feminisme-liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena semuanya memiliki hak yang sama. Meskipun demikian, pengikut teori ini menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan serta menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran termasuk bekerja diluar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan.

4. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Teori feminisme marxis-sosialis ini memandang ketimpangan gender sebagai hal yang disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, terutama di dalam keluarga. Selain itu, teori ini menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka ideologinya. Teori ini mengadopsi teori *praxis* Marxisme yang dimana merupakan teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Hal ini merupakan bentuk usaha untuk membangkitkan rasa emosi kaum perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan.

5. Teori Feminisme Radikal

Pada dasarnya teori ini hampir sama dengan teori feminisme marxis-sosialis, namun teori ini lebih menekankan pada serangannya keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Teori ini menganggap bahwa keluarga sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki, sehingga perempuan tertindas. Teori feminisme ini cenderung membenci kaum laki-laki dan menyerukan kaum perempuan untuk mandiri, bahkan keberadaan laki-laki tidak diperlukan dalam kehidupan perempuan. Disisi lain, teori ini menimbulkan fenomena lesbian.

Selain beberapa teori yang berkembang mengenai gender diatas, teori yang berlaku dan digunakan di Indonesia adalah teori *Nature*. Dimana teori *Nature* ini memasukkan konsep adat-istiadat, norma dan aturan agama dalam teorinya. Menurut teori *Nature* adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat sehingga tidak dapat diubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberi indikasi bahwa

perempuan dan laki-laki memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Di Indonesia, teori ini disalah artikan dan kerap dijadikan alasan dalam eksploitasi dan pengsubordinatan perempuan (Aldianto, 2015).

Menurut Todaro (2012), Prevalensi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, kapasitas pendapatannya rendah dan kendali mereka yang terbatas. Selain itu, perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan, pekerjaan sektor formal, jaminan sosial, dan program pekerjaan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya keuangan perempuan masih sedikit dan tidak stabil dibandingkan laki-laki. Perbedaan pendapatan antara rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan dapat terlihat pada upah yang diperoleh. Disisi lain perundang-undangan dan kebiasaan sosial seringkali membatasi perempuan untuk memiliki properti maupun mendapat akses kontrak keuangan.

Kebijakan pembangunan selama ini meningkatkan perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan sehingga memperburuk kesenjangan pendapatan serta semakin mengikis status ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Melihat hal tersebut, kesejahteraan perempuan sangat dipengaruhi oleh rancangan kebijakan pembangunan yang menggarisbawahi pentingnya integrasi perempuan dalam program-program pembangunan dengan memerlukan peningkatan partisipasi dalam pendidikan dan program pelatihan, ketenagakerjaan sektor formal, dan program penyuluhan pertanian. Namun, Hal yang sangat penting ialah rancangan kebijakan yang mengintegrasikan perempuan tidak membuat integrasi laki-laki dalam sektor ekonomi menurun sehingga kesetaraan gender tercapai yang secara langsung mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia selanjutnya dapat membantu mengurangi pengangguran dan secara langsung mengurangi jumlah penduduk miskin.

Keberhasilan pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender dapat diukur dari Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender yang dimana *United Nations Development Programme* (UNDP) menerbitkan dua indeks mengenai Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2.1.2.1 Pembangunan Gender

Pembangunan gender yang diproksi pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang menunjukkan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Komponen pembentuk IPG sama dengan yang digunakan IPM yakni Indeks kesehatan yang diwakili oleh umur harapan hidup, pendidikan diwakili oleh rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak diwakili oleh sumbangan pendapatan perkapita. Semua komponen tersebut disajikan menurut jenis kelamin (BPS, 2020).

a. Indeks Kesehatan Laki-Laki dan Perempuan

Indeks kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang tercermin dari kondisi fisik yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, leluasa, dan murah. Indikator penting

yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu negara adalah Umur Harapan Hidup (UHH).

UHH merupakan rata-rata jumlah perkiraan tahun hidup yang dapat ditempuh seseorang. Pada dasarnya, indeks kesehatan menyatakan seberapa persen capaian indikator kesehatan terhadap nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimum yang digunakan dalam indeks kesehatan adalah 85 tahun sedangkan nilai minimum UHH adalah 20 tahun, mengacu pada nilai maksimum yang direkomendasikan oleh UNDP.

Derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan (PMBG, 2013). Oleh karena itu pembangunan dibidang kesehatan mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta masyarakat dan swasta.

b. Indeks Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan

Indeks pendidikan menjadi modal dasar dan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia. Pendidikan mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih peka dan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan, serta membuka wawasan yang memungkinkan mengubah nasibnya. Indikator penting yang mencerminkan taraf pendidikan laki-laki dan perempuan di suatu negara adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dimana HLS merupakan pendorong untuk meningkatkan RLS.

Indeks rata-rata lama sekolah, merupakan persentase capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas yang terbagi dalam laki-laki dan perempuan, dibandingkan nilai maksimumnya. Nilai maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun, sesuai dengan yang digunakan oleh UNDP.

Selanjutnya, untuk Indeks Harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan merupakan persentase capaian harapan lama sekolah terhadap nilai maksimum yaitu 18 tahun yang mengacu pada nilai maksimum yang digunakan oleh UNDP.

Menurut Widodo (2006), tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sehingga penduduk laki-laki lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan mudah mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Semua indikator pendidikan yang terdapat pada akses dan pemerataan pendidikan; mutu dan relevansi pendidikan; serta manajemen pendidikan menunjukkan bahwa terjadi ketidaksetaraan gender di pihak perempuan. Sehingga dalam pendidikan, perempuan masih menjadi pihak yang masih perlu dioptimalkan keikutsertaannya.

c. Indeks Pengeluaran Laki-Laki dan Perempuan

Sumbangan pendapatan perkapita menjadi indikator standar hidup layak. Hal itu tentunya berkaitan dengan kesempatan kerja yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan. Jika partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan meningkat, maka tentunya akan menurunkan proporsi angkatan kerja laki-laki. Hal itu berdampak pada proporsi sumbangan pendapatan perempuan yang

meningkat dan memperkecil kesenjangan dengan proporsi sumbangan pendapatan laki-laki.

Indikator penting yang mencerminkan taraf standar hidup layak laki-laki dan perempuan di suatu negara dapat dilihat melalui indeks pengeluarannya. Batas maksimum dan minimum indeks pendapatan menggunakan satuan rupiah dimana batas minimum menggunakan garis kemiskinan kabupaten/kota yang terendah sedangkan batas maksimum menggunakan pengeluaran per kapita kabupaten yang tertinggi.

Faktor penyebab adanya perbedaan upah laki-laki dan perempuan salah satunya yaitu tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap tingkat produktifitasnya. Dari beberapa kasus, perempuan menjadi populasi terbanyak yang memiliki pendidikan rendah. Selain itu, Faktor lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan juga menjadi faktor penyebab adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Realitasnya pekerja perempuan sebagian besar bekerja sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaannya hanya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Sedangkan laki-laki sebagian besar bekerja di sektor padat modal dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar ini menjadikan adanya kesenjangan pada upah ataupun sumbangan pendapatan yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan (Kemenpppa, 2013).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam pengukuran IPG, semua variabel pembentuk IPM yang telah disebutkan dihitung dalam laki-laki dan

perempuan. Pengukuran IPM yang dipilah antara laki-laki dan perempuan, menghasilkan rasio yang disebut IPG.

2.1.2.2 Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan Gender yang diproksi pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang menggambarkan partisipasi perempuan dalam memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (BPS, 2020). Komponen pembentuk IDG diantaranya partisipasi politik, partisipasi ekonomi, dan Penguasaan sumberdaya ekonomi. Bidang partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen, Bidang partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan dengan perempuan sebagai tenaga tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi, sedangkan bidang penguasaan sumber daya ekonomi, yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan (Rajagukguk, 2015).

Bidang partisipasi politik berfokus pada partisipasi perempuan dalam parlemen/politik. Pada dasarnya partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus perempuan politik. Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih menjadi hal yang tidak mudah dikaitkan satu sama lain. Disatu sisi perempuan dituntut untuk berperan dalam semua sektor sebagai kontribusinya dalam pembangunan, disisi lain, tuntutan opini masyarakat tentang kodrat sebagai perempuan yang mengabdikan pada keluarga. Peran perempuan di pentas politik sudah menjadi isu penting untuk mendapat porsi yang proporsional. Sepatutnya tidak ada lagi diskriminasi yang meragukan kemampuan perempuan untuk berkontribusi dalam parlemen. Naik turunnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dapat dipicu oleh kebijakan yang ada karena pada

dasarnya dorongan perempuan untuk bergabung dalam dunia politik bergantung pada upaya-upaya dan kebijakan yang ada. (Priandi dan Roisah, 2019).

Bidang ekonomi dan pengambilan keputusan diwakilkan oleh perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Hal tersebut kembali berkaitan dengan peran perempuan dalam ketenagakerjaan. Terdapat tiga dimensi yang menjelaskan faktor pemilihan karier perempuan yang diantaranya dimensi kultural, dimensi struktural, dan dimensi tindakan. Dimensi kultural terdiri dari keluarga, ideologi, feminisme, dan kultur organisasional ; dimensi struktural terdiri dari struktur keluarga dan proses organisasional ; sedangkan dimensi tindakan terdiri dari pilihan dan strategi perempuan. Namun kenyataannya, perempuan masih menghadapi masalah gender dalam dunia kerja (Rajagukguk, 2015).

Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah. Hal itu tercerminkan pada kemampuan perempuan dalam memperoleh peluang kerja yang masih rendah dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam Indeks Pemberdayaan Gender, sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu indikator ketercapaian. Namun realitanya kesenjangan upah berdasarkan gender masih sangat lazim. Perempuan yang memiliki pendapatan sendiri cenderung memiliki banyak pilihan. Ketika memiliki kontribusi yang besar pada ekonomi keluarga, seorang perempuan akan ikut berperan dalam pengambilan keputusan rumah tangganya. Lebih jauh lagi, perempuan yang memiliki pendapatan sendiri cenderung mudah dalam meninggalkan pasangannya ketika mengalami kekerasan internal yang sudah diluar kendali. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai sumbangan pendapatan perempuan menjadi penting dilakukan (Putrie & Rahman, 2019).

2.1.3 Bonus Demografi

Jumlah total penduduk menjadi unsur penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk dari waktu ke waktu yaitu tingkat kelahiran (*fertility*), kematian (*mortality*) dan migrasi bersih (*net-migration*). Awal mula pemikiran mengenai kekhawatiran pertumbuhan penduduk yang pesat dikemukakan oleh Thomas Malthus pada tahun 1798 dalam tulisannya yang berjudul "*An Essay on the Principles of Population*". Malthus khawatir melihat pertumbuhan penduduk yang pesat akan berdampak pada kecukupan ketersediaan pangan, dimana hal tersebut Malthus formulasikan ke dalam postulat sebagai berikut: "*I said that population, when unchecked, increase in a geometrical ratio, and subsistence for man in an arithmetical ratio (Malthus, 1798 : 6)*". Postulat tersebut dapat diterjemahkan ke dalam angka-angka, dimana pertumbuhan penduduk layaknya mengikuti deret ukur, sedangkan produksi pangan tumbuh layaknya mengikuti deret hitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk bertumbuh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan sehingga seiring berjalannya waktu keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan akan terganggu.

Transisi demografi mempengaruhi perubahan struktur usia yang ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah usia produktif bekerja (15-64 tahun), diiringi dengan penundaan pertumbuhan usia penduduk muda (di bawah 15 tahun), dan semakin sedikitnya jumlah penduduk manual (di atas 64 tahun) atau penurunan rasio ketergantungan ini lazim dikenal sebagai bonus demografi. Turunnya rasio ketergantungan pada suatu saat akan mencapai titik terendah dan berbalik meningkat

kembali. Bonus demografi disebut *The Window of Opportunity* dimana kesempatan tersebut sangat singkat hanya terjadi satu kali saja dalam satu dekade seluruh perjalanan kehidupan penduduk (Astuti & Soetarmiyati, 2016).

Bonus Demografi menciptakan peluang yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi bertumbuh pada adanya penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang selanjutnya akan menghasilkan pertambahan output yang pada gilirannya akan bekerja dengan sangat baik dalam mengurangi kemiskinan (Bloom, 2003). Dengan kata lain, apabila bonus demografi dapat dimaksimalkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan maksimal dan tingkat kemiskinan akan dapat berkurang.

Dengan persiapan yang dan investasi yang tepat, bonus demografi bisa mengubah masa depan suatu wilayah. Namun keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan konsistensi penurunan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana. Pengelolaan ketenagakerjaan yang baik dengan mempersiapkan angkatan kerja yang berkualitas akan menentukan keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Untuk itu dalam mempersiapkan angkatan kerja yang berkualitas haruslah dilihat dari aspek kualitas pendidikan, kesehatan dan kecukupan gizi (Sutikno, 2020).

Menurut Adioetomo (2005), terbukanya *the window of opportunity* yang menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas ini, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dimana satu hal yang paling mendasar yakni dengan meningkatkan

kualitas sumberdaya manusia agar mempunyai keterampilan yang berkualitas dan mampu terserap dalam dunia kerja. Di sisi lain, kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan dampak dari bonus demografi.

Menurut Jati (2015), bonus demografi akan memberikan keuntungan ekonomi apabila memenuhi beberapa hal yakni: (a) Penawaran tenaga kerja yang besar dengan kualitas yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja; (b) Meningkatkan pendapatan per kapita karena mendapat kesempatan kerja yang produktif; (c) Peningkatan peranan kaum perempuan di pasar tenaga kerja karena jumlah anak yang semakin sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja dan membantu peningkatan pendapatan keluarga; (d) Terjadi peningkatan tabungan masyarakat yang di investasikan secara produktif; dan (e) Adanya peningkatan investasi sumberdaya modal manusia.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Gender dan Kemiskinan

Keterkaitan antara gender dan kemiskinan menjadi fenomena yang kompleks. Gender sebagai suatu tatanan masyarakat yang menciptakan pembedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan masyarakat maupun keluarga, dipandang sebagai faktor utama terjadinya ketimpangan yang merugikan dan memiskinkan perempuan.

Akhmadi (2005) dalam hasil studinya yang berjudul "Gender dan Kemiskinan" menjelaskan bahwa terdapat perbedaan cara pandang laki-laki dan

perempuan mengenai penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan memiliki enam unsur yaitu ketidakberdayaan, keterkucilan, kemiskinan materi, kelemahan fisik, kerentanan dan sikap/perilaku. Keenam unsur tersebut memperlihatkan bahwa dalam berdiskusi, perempuan cenderung lebih banyak mengungkapkan mengenai faktor yang berkaitan dengan ketidakberdayaan dan perilaku serta persoalan mengenai kelemahan fisik khususnya status gizi keluarga, Sedangkan laki-laki cenderung lebih banyak mengungkapkan mengenai persoalan dan faktor yang berkaitan dengan keterkucilan fisik maupun nonfisik. Selain itu, relasi gender mempengaruhi kesempatan kerja, pembagian kerja, pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan publik. Di sebagian besar masyarakat, perempuan cenderung bekerja lebih lama, mendapat upah lebih kecil, kurang mendapat prioritas di bidang pendidikan dan memiliki akses lebih terbatas, serta sering tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Perbedaan persepsi perempuan dan laki-laki mengenai penyebab persoalan kemiskinan berkaitan dengan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Maitra dan Vahid (2006) menemukan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan memiliki kondisi ekonomi sangat buruk jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. Ahmad dkk (2015) pun menambahkan Ketidaksetaraan di dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk pembedaan yang berbeda, antara lain pada (1) akses terhadap sumber produktif, seperti tanah, modal, kepemilikan, serta pendidikan dan pelatihan, (2) kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga, (3) pembagian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja reproduktif perempuan, (4) perbedaan konsumsi makanan, obat-obatan, pelayanan

kesehatan, dan pendidikan, dan (5) perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Selain itu, dalam relasinya dengan kemiskinan, kemungkinan perempuan hidup dalam kemiskinan lebih tinggi dan meningkat dibandingkan dengan laki-laki.

Beberapa ulasan diatas menunjukkan bahwa ketimpangan gender memperparah kemiskinan. Sangat penting dalam mengakomodasi masalah ketimpangan gender dalam penentuan kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak dapat terlepas dari perbedaan cara pandang laki-laki dan perempuan dan perbedaan kapasitas dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Pada akhirnya program pengentasan kemiskinan juga mengakomodasi masalah ketimpangan gender dengan memberi perhatian dan perlakuan khusus pada kaum perempuan yang miskin (Indraswari, 2009).

2.2.2 Hubungan antara Bonus Demografi dan Kemiskinan

Bonus Demografi menjadi peluang untuk mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Bonus demografi adalah percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari penurunan tingkat kematian dan kesuburan di suatu negara dan merupakan perubahan selanjutnya dari perubahan struktur usia dari sebuah populasi. Dengan tingkat kelahiran yang lebih kecil setiap tahun, jumlah penduduk usia di bawah produktif akan tumbuh lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi penduduk usia kerja. Dengan lebih sedikit jumlah penduduk lanjut usia, maka negara memiliki jendela peluang (*window of opportunity*) untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang cepat jika dibarengi dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang dirumuskan dengan tepat (Setiawan, 2018).

Jumlah penduduk secara langsung mempengaruhi kemiskinan, dimana seperti yang kita ketahui semakin banyak jumlah tanggungan anggota keluarga maka akan semakin besar pula kebutuhan rumah tangga. Sehingga terkadang anggota keluarga yang produktif tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karena semakin banyak jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Jumlah anggota dalam rumah tangga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga, dimana semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar pula pendapatan yang harus dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Arsyad (2010), Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di negara-negara sedang berkembang menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Akibatnya angka beban tanggungan (*burden of dependency ratio*), yaitu perbandingan antara orang-orang yang belum/tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang ada dalam batas umur turut serta dalam proses produksi. *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, secara tidak langsung dengan tingginya *dependency ratio* yang terjadi tidak diimbangi dengan persediaan lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada kemiskinan disebabkan jumlah penduduk yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga beban ketergantungan yang meningkat dikarenakan adanya masalah terhadap pembangunan ekonomi yang menimbulkan *gap employment* dan jumlah kemiskinan. Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik salah satunya dengan persediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan